

KEIKUTSERTAAN GURU DALAM MENYUSUN RAPBS PADA SEKOLAH BINAAN WILAYAH III SAMA TIGA KABUPATEN ACEH BARAT

Ainun Mardhiah

Pengawas Sekolah TK Wilayah III Sama Tiga

Abstrak

Penelitian tindakan Sekolah ini bertujuan untuk melihat Keikutsertaan guru dalam Menyusun RAPBS dengan manfaat untuk mengetahui RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah binaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat dijadikan referensi. Kajian ini memakai metode PTS yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Pelaksanaannya di Sekolah Binaan Wilayah III Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat Dalam kurun waktu 3 bulan. Subjek penelitiannya yaitu Sekolah Binaan Wilayah III Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat berjumlah 10 TK Binaan, data PTS ini dari TK binaan, hasil observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh data ini menggunakan instrumen kuesioner dan lembar wawan cara kepala sekolah. Data divalidasikan dan diferifikasi dengan mencantumkan dalam daftar nilai. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mencari jumlah pemahaman RAPBS dan ketidak Paham Guru setiap binaan. Analisis dilakukan dengan cara mencari statistik presentase. Sebagai indikator keberhasilan pengamatan terhadap arsip-arsip/dokumen RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah binaan diperoleh kekurangan atau kejanggalan pemahaman Guru Siklus I yaitu Dana rutin untuk belanja pegawai tidak tampak jelas, dalam format tidak terisi. Seharusnya sumber dana belanja harus tampak jelas penggunaannya, Dana belanja barang yang bersumber dari dana Block Grant tidak mencerminkan, hanya digunakan untuk mobiler. Seharusnya perlu untuk porsi untuk guru (kegiatan PBM) atau untuk siswa dan dana ketenagaan tidak ada dalam format (kosong). Seharusnya diisi sesuai dengan kemampuan yang ada. Lalu siklus II yaitu Berdasarkan Hasil pengamatan terhadap arsip-arsip/dokumen RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah binaan dan juga hasil angket dari guru dan komite sekolah diperoleh beberapa kekurangan atau kejanggalan pada siklus I, maka pada siklus II peneliti melakukan pembinaan terhadap berbagai kekurangan baik pada kepala sekolah maupun pada RAPBS yang telah dibuat.

Kata Kunci : Keikut Sertaan Guru, Menyusun RAPBS.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan sebuah lembaga yang perlu di jaga dan di kelola sebaik-baiknya, agar sumber daya yang ada dapat di mamfaatkan secara efisien untuk mencapai suatu tujuan sekolah yang telah di tetapkan karena pengelolaan sekolah seperti halnya pengelolaan lembaga lainya dan tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen yang baik pula.

Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah yang dipimpinya, sedangkan guru adalah salah satu komponen sekolah yang sangat menentukan berhasil tidaknya atau tinggi rendahnya mutu pendidikan di suatu sekolah. Salah satu tugas Kepala Sekolah di bidang perencanaan adalah menyusun

Anggaran pendapatan dan belanja sekoalah (RAPBS). Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah seharusnya melibatkan semua komponen sekolah seperti komite sekolah, guru, tata usaha, dan tenaga kependidikan lainya sama-sama memikirkan apa saja ayang perlu diprogramkan sesuai dengan Anggaran atau dana sekolah yang ada.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa sekolah binaan dan juga hasil diskusi dengan teman-teman pengawas sekolah lainnya, bahwa banyak kepala sekolah yang tidak melibatkan guru dan komponen sekolah lainya dalam menyusun dan melaksanakan RAPBS, sehingga roda pendidikan di sekolah tersebut tidak bejalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga terjadi pada sekolah-sekolah di

Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan tersebut dalam suatu penelitian tindakan kepengawasan dengan judul **“Keikutsertaan guru dalam Menyusun RAPBS pada Sekolah Binaan Wilayah III Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat”**. Beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana keterlibatan guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam RAPBS yang telah disusun oleh kepala sekolah binaan?
2. Apakah RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah binaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?
3. Bagaimanakah cara menyamakan persepsi antara kepala sekolah, guru, dan komponen sekolah lainnya dalam menyusun RAPBS yang sifatnya komprehensif?
4. Bagaimanakah hasil atau realisasi dari RAPBS yang disusun secara komprehensif dengan melibatkan semua komponen sekolah binaan?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Keikutsertaan guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam RAPBS yang telah disusun oleh kepala sekolah binaan.
2. RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah binaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Cara menyamakan persepsi antara kepala sekolah, guru, dan komponen sekolah lainnya dalam menyusun RAPBS yang sifatnya komprehensif.
4. Hasil atau realisasi dari RAPBS yang disusun secara komprehensif dengan melibatkan semua komponen sekolah binaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan bagi kepala-kepala sekolah dalam menyusun dan melaksanakan RAPBS disekolah untuk masa yang akan datang. Disamping itu, juga melalui kegiatan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis sendiri dalam melakukan penelitian baik dalam bidang pendidikan maupun bidang pengawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran merupakan rencana yang di konfirmasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu tertentu, serta alokasikasi sumber-sumber pada setiap aktifitas . Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi aktifitas yang di lakukan oleh sekolah. Setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktifitas sesuai dengan Anggaran yang telah di tentukan sebelumnya dan mencatat Anggaran dan melaporkan realisasi sehingga dapat di perbandingkan selisih Anggaran dengan pelaksana.

Banyak rumusan tentang Anggaran yang di kemukakan oleh para ahli, sesuai dengan menurut sudut pandang kacamata disiplin yang mereka tinjau, penulis mengambil dari sudut pandang (Pedoman kamus bahasa Indonesia), Anggaran adalah Perkiraan, Perhitungan, atau tafsiran. Sedangkan Pendapatan adalah Segala sesuatu yang di terima berupa uang, buku, material dan lain-lain, dalam satuan Anggaran, dan rencana adalah Sesuatu yang akan di kerjakan.

Apabila kita ingin memahami tentang pengertian Anggaran secara lebih mendalam ,hendaknya janganlah kita berpegang pada salah satu pandangan saja, melainkan haruslah berpegang pada berbagai pandangan secara keseluruhan atau secara kompleks atau secara sisitim ini berarti kita telah mandang dengan menggunakan multidisiplin, di mana penulis menggunakan konsep-konsep analisis dari berbagai disiplin ilmu. Seperti yang di kemukakan dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) bahwa ketika rencana dan program tahunan sekolah telah di susun, berikutnya di ikuti dengan penyusunan rencana Anggaran yang disebut dengan RAPBS (Depdiknas, 2003:7). Berdasarkan kutipan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana yang di susun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan, dan juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalain serta alat analisis agar fungsi-fungsinya berjalan dengan baik yang di realisasikan pada pelaksanaan kegiatan.

PENYUSUNAN RAPBS

Untuk melakukan sesuatu kita harus berpedoman pada program kerja. Menurut Tita

Lestari (2007:9) bahwa “program kerja adalah rencana yang disusun dan berisi berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan tujuan, sasaran (target), metodologi dan jangka waktu, serta rincian biaya dan hasil yang akan dicapai sebagai arah dalam melakukan tindakan dalam jangka waktu tertentu”. Berdasarkan kutipan tersebut, maka salah satu program kerja kepala sekolah adalah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah seharusnya melibatkan semua komponen sekolah seperti komite sekolah, guru, tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya sama-sama memikirkan apa saja yang perlu diprogramkan sesuai dengan Anggaran atau dana sekolah yang ada.

Berdasarkan Anggaran yang ada atau yang di butuhkan barulah disusun RAPBS sesuai dengan skala prioritas, memiliki tiga persyaratan manajemen modern yang sehat, yakni demokratis, transparan dan akuntabel. Demokratis maksudnya dalam menyusun RAPBS harus di libatkan semua urusan yang terkait. Transparan artinya pelaksanaan RAPBS tidak ditutup-tutupi karena adanya tujuan atau maksud tertentu yang tidak bertanggung jawab. Semua urusan yang terkait dapat secara terbuka melihat dan memberikan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAPBS. Akuntabel artinya pelaksanaan RAPBS tersebut di laporkan secara tertulis kepada semua stake holder pendidikan. Oleh karena itu suatu rencana yang telah di susun dengan baik tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang baik pula dan sesuai yang telah di rencanakan.

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAPBS adalah:

1. Memiliki Data dan dokumen yang cukup lengkap tentang siswa ,guru,dan karyawan serta informasi lain berkenan dengan harga pasar.
2. Memiliki rencana strsatgis sekoalah untuk lima tahun.
3. Menyusun kebutuhan sekolah pada tahun yang berdasarkan masukan dari para guru dan warga sekolah.
4. Menentukan alternative penerimaan sesuai dengan kebutuhan tersebut.
5. Menyusun konsep RAPBS (atau di susun oleh satu tim yang di bentuk itu).
6. Mengajukan RAPBS kepada Komite Sekolah.

7. Rapat pembahasan RAPBS dengan Komite Sekolah.
8. Penyepakatan RAPBS.
9. Pelaksanaan RAPBS.
10. Evaluasi.
11. Penyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan RAPBS (Depdiknas, 2004).

Berdasarkan kutipan di atas, Jelaslah bahwa keterlibatan seluruh unsur-unsur Sekolah dalam menyusun RAPBS dapat meningkatkan kesadaran Kepala Sekolah guru, dan tenaga kependidikan lainnya dapat berkerja secara demokratis, Kopuhensif dan serta memperbesar kesediaan untuk saling tolong menolog sehingga lebih memahami tujuan dan peranan sekolah dalam merealisasi tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Merupakan Penelitian Tindakan Sekolah dengan pendekatan Deskriptif. Arikunto (2002:10) menyatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakkan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Tahap Pelaksanaan

Sebelum melaksanakan tindakan disekolah binaan, terlebih dahulu dahulu peneliti mengakan koordinasi dengan UPTD Wilayah III Kabupaten Aceh Barat, para kepala sekolah dan Guru pembimbing untuk kelancaran pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan tindakan untuk setiap kali pertemuan mengikuti siklus rancangan penelitian tindakan kelas (action research), yaitu **rencana – tindakan – a. observasi dan refleksi**.

Pada siklus pertama dilakukan pengamatan terhadap arsip-arsip atau dokumen tentang RAPBS yang sudah pernah disusun pada tahun-tahun sebelumnya dan siklus kedua latihan menyusun RAPBS yang diikuti oleh kepala sekolah, komponen sekolah seperti komite sekolah, guru, tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Siklus ketiga dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan RAPBS yang sudah disusun pada siklus kedua disekolah yang bersangkutan.

Tehnik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang kelemahan dan kekurangan pada arsip-arsip RAPBS yang sudah disusun dan juga hasil wawancara dengan kepala sekolah serta hasil angket yang diberikan kepada guru-guru, komite sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.

Tehnik Pengolahan Data

Setelah Semua Data Dikumpulkan Lalu Dianalisis Secara Diskriptis, Yaitu Mendiskripsikan Terhadap Kelemahan Dan Kekurangan Pada Arsip-Arsip Rapbs Yang Sudah Disusun Dan Juga Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Data Dan Analisis Data, Maka Diperoleh Hasil Penelitian Sebagai Berikut:

Siklus I

Hasil Pengamatan Terhadap Arsip-Arsip/Dokumen Rapbs Yang Sudah Disusun Oleh Kepala Sekolah Binaan Diperoleh Kekurangan Atau Kejanggalan, Yaitu:

1. Dana Rutin Untuk Belanja Pegawai Tidak Tampak Jelas, Dalam Format Tidak Terisi. Seharusnya Sumber Dana Belanja Harus Tampak Jelas Penggunaannya.
2. Dana Belanja Barang Yang Bersumber Dari Dana Block Grant Tidak Mencerminkan, Hanya Digunakan Untuk Mobiler. Seharusnya Perlu Untuk Porsi Untuk Guru (Kegiatan Pbm) Atau Untuk Siswa.
3. Dana Ketenagaan Tidak Ada Dalam Format (Kosong). Seharusnya Diisi Sesuai Dengan Kemampuan Yang Ada.
4. Dana Ketatausahaan Tidak Ada Dalam Format (Kosong). Seharusnya Diisi Sesuai Dengan Kemampuan Yang Ada.
5. Secara Keseluruhan Total Dana Yang Ada Disekolah Tidak Terlihat. Seharusnya Hal Ini Tampak Jelas Berapa Anggaran Yang Dikelola Dalam Kegiatan Satu Tahun.
6. Lembar Pengesahan Hanya Ditanda Tangani Oleh Kepala Sekolah Saja. Seharusnya Diketahui Oleh Komite

Sekolah, Dan Penanggung Jawab Pengelola (Bendahara), Dan Juga Pengawas Sekolah.

Hasil Pengamatan Terhadap Arsip-Arsip/Dokumen Rapbs Yang Sudah Disusun Oleh Kepala Sekolah Binaan Diperoleh Kekurangan Atau Kejanggalan, Yaitu:

- a. Penggunaan Dana Dan Uraian Kurang Jelas Keperpihakan Kepada Kegiatan Guru.
- b. Banyak Alokasi Dana Diprogramkan Pada Rehab Dan Pengadaan Alat Kantor (ATK).
- c. Dana untuk program kegiatan peningkatan mutu banyak terserap pada kegiatan ujian semester dan ujian akhir nasional. Seharusnya dana harus dialokasikan lebih banyak kepada kegiatan pengayaan atau kegiatan guru dan siswa.
- d. Lembar pengesahan sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah dan komite, tetapi belum diketahui oleh penanggung jawab pengelola (bendahara), dan juga pengawas sekolah.

Siklus II

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap arsip-arsip/dokumen RAPBS yang sudah disusun oleh kepala sekolah Binaan dan juga hasil angket dari guru dan komite sekolah diperoleh beberapa kekurangan atau kejanggalan pada siklus I, maka pada siklus II peneliti melakukan pembinaan terhadap berbagai kekurangan baik pada kepala sekolah maupun pada RAPBS yang telah dibuat. Dalam siklus II ini peneliti mencoba membangun sikap transparansi, demokrasi, dan komperhensif serta terjadi saling memberikan masukan yang positif, dan menampung aspirasi-aspirasi dari semua kompenen sekolah, yang akan menyusun RAPBS pada tahun Anggaran 2014/2015 mendatang dan melalui siklus II ini telah tersusun sebuah panduan atau pedoman tentang penyusunan RAPBS di setiap binaan khususnya di Kabupaten Nagan Raya dan di provinsi NAD pada umumnya.

Hasil pengolahan angket yang diberikan kepada guru pada sekolah binaan di atas menunjukkan bahwa 56,66% guru tidak tahu tentang RAPBS; 93,33% guru mengatakan kepala sekolah tidak pernah membuat rapat

tentang penyusunan RAPBS; 86,67% mengatakan kepala sekolah tidak meminta masukan dari guru tentang RAPBS; dan 53,33% guru mengatakan bahwa yang ikut rapat penyusunan RAPBS adalah orang-orang tertentu saja sesuai dengan yang diundang oleh kepala sekolah.

Hasil pengolahan angket yang diberikan kepada komite sekolah pada sekolah binaan di atas menunjukkan bahwa 80% komite sekolah tidak tahu tentang RAPBS; 70% komite sekolah mengatakan kepala sekolah kadang-kadang pernah membuat rapat tentang penyusunan RAPBS; 60% mengatakan kepala sekolah tidak meminta masukan dari guru tentang RAPBS; dan 60% komite sekolah mengatakan bahwa yang ikut rapat penyusunan RAPBS adalah orang-orang tertentu saja sesuai dengan yang diundang oleh kepala sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Arsip atau dokumen RAPBS yang telah disusun oleh kepala sekolah di sekolah binaan banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan atau belum memenuhi RAPBS yang sebenarnya.
2. Keterlibatan guru, komite sekolah dan tenaga kependidikan lainnya masih sangat kurang dalam menyusun RAPBS di sekolah binaan .
3. RAPBS yang lebih komprehensif baru dapat dilihat pada tahun anggaran 2014/2015 jika para penyusun nanti berpedoman pada format yang ada sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (1991). *Model Penampilan Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Depdiknas. (2003). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Depdiknas. (2007). *Pedoman Bantuan Dana Langsung (Block Grant) Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bagi Pengawas Sekolah SMP /SMK*. Jakarta:

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Mendagri. (2002). *Gambaran Umum Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Depdiknas. (2002 a). *Sistem dan Prosedur Akutansi Pengeluaran Kas*. Jakarta.

Depdiknas. (2002 b). *Penyelenggaraan School Reform dalam MPMBS di SMU*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Depdiknas dan Depag. (2006). *Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Depdiknas. (2004). *Tanya Jawab Sekitas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Depdiknas. (2006). *Perihal Tata cara pelaksanaan Dana Alokasi Khusus*.